

DIGITALISASI PESANTREN DAN PERUBAHAN OTORITAS KEILMUAN

Abdul Halim¹, Babun Suharto², Imam Safe'i³

^{1,2,3}Universitas Islam Darul 'Ulum (UNISDA) Lamongan, Indonesia
2505301040@mhs.unisda.ac.id¹, babunsuharto22@gmail.com²,
isa.tamyes@gmail.com³

Abstract: This study examines the transformation of pesantren scholarly authority in the context of increasing digitalization. Traditionally, pesantren as Islamic educational institutions have maintained a well-established structure of scholarly authority grounded in *turāth*, chains of scholarly transmission (*sanad*), and hierarchical relations between *kiai* and *santri*. However, the expansion of digital media has created new spaces for the production and dissemination of religious knowledge, leading to the fragmentation and individualization of religious authority. This study employs a library research method by analyzing classical and contemporary literature on pesantren, religious authority, and digital Islam. The findings indicate that digitalization has encouraged a shift from epistemic authority toward performative authority, without entirely eroding the role of pesantren. Instead, pesantren respond to these challenges by developing hybrid forms of authority that integrate traditional scholarly legitimacy with digital engagement. This study concludes that pesantren possess adaptive capacity to sustain their scholarly authority and remain relevant within the plural and competitive landscape of digital religion.

Keywords: Pesantren, Digitalization, Scholarly Authority, *Kiai*.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perubahan otoritas keilmuan pesantren di tengah perkembangan digitalisasi. Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tradisional memiliki struktur otoritas keilmuan yang berakar pada tradisi *turats*, *sanad* keilmuan, serta relasi hierarkis antara *kiai* dan *santri*. Namun, kehadiran media digital menciptakan ruang baru dalam produksi dan distribusi pengetahuan keagamaan yang berdampak pada fragmentasi dan individualisasi otoritas keilmuan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer terkait pesantren, otoritas keagamaan, dan Islam digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong pergeseran dari otoritas epistemik menuju otoritas performatif, tetapi tidak menghilangkan peran pesantren sepenuhnya. Pesantren justru melakukan adaptasi melalui pembentukan otoritas hibrida yang mengintegrasikan legitimasi keilmuan tradisional dengan pemanfaatan media digital. Penelitian ini menegaskan bahwa pesantren tetap memiliki kapasitas adaptif untuk mempertahankan relevansi otoritas keilmuannya di era digital.

Kata kunci: Pesantren, Digitalisasi, Otoritas Keilmuan, *Kiai*.

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang memiliki peran historis dan epistemik yang sangat penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Selama berabad-abad, pesantren telah berperan sebagai lokus utama untuk penciptaan, diseminasi, dan validasi pengetahuan Islam, dengan menerapkan metodologi pembelajaran yang berakar pada kajian *turats* (warisan intelektual Islam), *sanad* keilmuan (rantai transmisi keilmuan), serta dinamika relasional hierarkis antara kyai (ulama/guru) dan santri (murid). Dalam kerangka tradisi pesantren, kewenangan keilmuan tidak semata-mata diukur dari kemampuan mendalami naskah-naskah keagamaan, melainkan juga dipengaruhi oleh pengakuan sosial, karisma personal, dan kelangsungan garis keturunan intelektual yang dijaga dengan cermat.¹

Kewenangan keilmuan di lingkungan pesantren memiliki dimensi institusional dan personal secara simultan. Sosok kyai memegang peran krusial sebagai pemangku otoritas keilmuan, moral, dan sosial. Legitimasi keilmuan kyai dibentuk melalui penguasaan mendalam terhadap kitab-kitab klasik, *sanad* keilmuan yang terverifikasi, serta penerimaan dari komunitas pesantren. Konfigurasi otoritas semacam ini menjadikan pesantren sebagai lingkungan yang kondusif bagi pembentukan pengetahuan Islam yang cenderung stabil dan termanajemen, dengan mekanisme validasi keilmuan yang bersandar pada praktik *talaqqi* (pembelajaran tatap muka) dan instruksi langsung.²

Namun demikian, perkembangan teknologi digital dan media baru dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap produksi dan distribusi pengetahuan keagamaan. Digitalisasi memfasilitasi transmisi pengetahuan Islam yang cepat, ekstensif, dan melampaui batas geografis melalui beragam sarana digital, termasuk jejaring sosial, platform berbagi video, podcast, serta aplikasi edukasi digital. Perkembangan ini menciptakan sebuah arena baru untuk ekspresi pemahaman Islam, yang kini tidak sepenuhnya bergantung pada struktur otoritatif pesantren.³

Arena digital memperkenalkan paradigma baru dalam pembentukan otoritas keagamaan. Validitas keilmuan tidak lagi semata-mata diukur dari penguasaan mendalam atas warisan keilmuan klasik, namun kerap kali ditentukan oleh tingkat kehadiran daring, daya tarik di kalangan publik, serta

¹ Abraar, "Digitalisasi Kitab Kuning: Analisis Dampak Aplikasi Fikih Digital Terhadap Otoritas Keilmuan Pesantren," *An-Nur: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 2 (2024): 12–15.

² Samsul, "The Urgency of Digitalizing Islamic Religious Learning in Pesantren," *Al-Irfan: Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2024): 1–4.

³ Muzayana, "TikTok, Digital Da'wa, and Religious Authorities in Contemporary Islam," *Journal of Islamic Communication and Culture* 2, no. 1 (2023): 45–47.

kapabilitas para pegiat agama dalam menyajikan ajaran Islam sesuai dengan preferensi audiens digital. Kondisi ini memberikan ruang bagi kemunculan figur-figur otoritas kontemporer, seperti tokoh agama yang aktif di media sosial, penceramah daring, dan influencer bertema Islam, yang memiliki jangkauan pengaruh signifikan sekalipun tidak selalu memiliki basis pendidikan pesantren yang kokoh.⁴

Dalam lingkungan pesantren, adopsi teknologi digital tidak hanya mengubah cara pengajaran dan penyampaian ajaran agama, tetapi juga mentransformasi tatanan dan cara kerja otoritas keilmuan. Otoritas yang sebelumnya bersifat bertingkat dan terpusat kini menghadapi tantangan dari tersebarnya otoritas di ranah digital yang fleksibel dan mudah diakses. Situasi ini memunculkan interaksi baru yang melibatkan tawar-menawar, penyesuaian, bahkan persaingan antara otoritas keilmuan pesantren dengan otoritas keagamaan yang berasal dari ranah digital.

Beberapa penelitian mengenai pesantren dan digitalisasi cenderung menganalisis fenomena ini dari sudut pandang nilai-nilai yang ada, baik sebagai potensi yang membahayakan otoritas lama maupun sebagai kesempatan untuk memodernisasi pesantren. Kerangka pendekatan seperti ini belum sepenuhnya mencerminkan kerumitan perubahan hubungan kekuasaan dalam bidang pengetahuan yang sedang berlangsung. Padahal, digitalisasi seharusnya dipandang sebagai medan sosial baru yang memengaruhi proses penciptaan, pengesahan, dan perebutan pengetahuan keislaman oleh beragam pihak.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian tentang **Digitalisasi Pesantren Dan Perubahan Otoritas Keilmuan** menjadi penting untuk dilakukan secara kritis dan analitis. Kajian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan studi pesantren kontemporer, tetapi juga berkontribusi pada diskursus yang lebih luas mengenai otoritas keagamaan Islam di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis, seperti manuskrip, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik kajian.⁶ Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis konseptual dan teoritik

⁴ Kuswana dan Pauzian, "Religious Authority in the New Media Era: Da'wah of Islamic Boarding School on Social Media," *Jurnal Ilmu Dakwah* 44, no. 2 (2024): 189–92.

⁵ Mustofa, et al., "Hybrid Pesantren in Indonesia: Analyzing the Transformation of Islamic Religious Education in the Digital Age," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2024): 66–69.

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011).

mengenai transformasi otoritas keilmuan pesantren akibat digitalisasi, bukan pada pengumpulan data lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi karya-karya klasik dan kontemporer yang membahas pesantren, otoritas keagamaan, serta teori otoritas dalam Islam. Sementara itu, literatur sekunder mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi ilmiah yang mengkaji relasi antara agama, media digital, dan perubahan struktur otoritas keilmuan.

PEMBAHASAN

Otoritas Keilmuan Pesantren dalam Tradisi Pendidikan Islam Klasik

Karakteristik otoritas keilmuan pesantren dalam tradisi pendidikan Islam klasik tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan *epistemologis* pembentukan pesantren sebagai pusat transmisi pengetahuan keagamaan. Pesantren telah berevolusi melampaui sekadar institusi pendidikan, melainkan telah menjelma menjadi sarana pembentukan otoritas keilmuan yang secara bersamaan menyatukan aspek intelektual, moral, dan sosial. Dalam konteks ini, otoritas keilmuan tidak semata-mata diartikan sebagai penguasaan materi keagamaan, tetapi lebih sebagai produk dari proses pembentukan legitimasi yang memakan waktu, yang dicapai melalui tradisi keilmuan, interaksi antara pengajar dan peserta didik, serta pengakuan dari komunitas religius.⁷

Dalam tradisi pendidikan Islam di Nusantara, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu, tetapi juga sebagai ekosistem otoritas keilmuan yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan beragama santri. Pembentukan otoritas keilmuan di lingkungan pesantren merupakan hasil interaksi historis antara struktur organisasi, peran sentral para kiai, warisan tradisi intelektual, dan pengakuan sosial-keagamaan. Oleh karena itu, pesantren seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai institusi pendidikan formal konvensional, melainkan sebagai arena sosio-intelektual yang secara konsisten menghasilkan dan mengukuhkan legitimasi keagamaan.⁸

Ciri utama otoritas keilmuan pesantren terletak pada peran sentral kiai sebagai pemegang kewenangan akademik, moral, dan sosial. Legitimasi keilmuan kiai dibangun melalui penguasaan literatur klasik (*turats*), kesinambungan sanad keilmuan, serta pengakuan komunitas. Secara sosiologis, kiai merepresentasikan otoritas tradisional karismatik, di mana kredibilitas

⁷ Mustofa, et.all., "Hybrid Pesantren in Indonesia: Analyzing the Transformation of Islamic Religious Education in the Digital Age." 60–62.

⁸ Azra, *Islam Nusantara dan Jaringan Global Lokal*, (Bandung: Mizan, 2020), 45-46.

keilmuan tidak hanya bersumber dari penalaran tekstual, tetapi juga dari kualitas personal dan pengaruh spiritual. Dalam konteks ini, otoritas keilmuan pesantren bersifat individual sekaligus institusional.⁹

Otoritas keilmuan pesantren juga bertumpu pada keberadaan sanad keilmuan dan tradisi *turats* sebagai fondasi validasi epistemik. Melalui sanad, pengetahuan yang diperoleh santri dihubungkan dengan jejaring keilmuan para ulama terdahulu hingga mencapai sumber-sumber otoritatif dalam Islam, sehingga ilmu dipahami bukan sekadar informasi, melainkan amanah yang harus ditransmisikan secara bertanggung jawab. Tradisi *turats*, khususnya kitab kuning, berfungsi sebagai medium utama transfer pengetahuan yang menuntut penguasaan metodologis, historis, dan konseptual. Praktik pengajian kitab melalui metode bandongan dan sorogan menegaskan posisi kiai sebagai mediator epistemik yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mengesahkan pengetahuan keagamaan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, karakteristik otoritas keilmuan pesantren dalam tradisi pendidikan Islam klasik dapat disintesis dalam beberapa poin utama. Pertama, kewenangan intelektual tersusun secara bertingkat serta terkonsentrasi, di mana tokoh kiai memegang peran sentral. Kedua, pengabsahan keilmuan didasarkan pada rantai transmisi keilmuan, kemahiran dalam literatur klasik, dan penerimaan masyarakat, bukan pada prosedur birokratis. Ketiga, pembentukan dan pengesahan pengetahuan terjadi dalam lingkungan fisik yang diawasi ketat, dengan metode *talaqqi* sebagai alat fundamental. Keempat, kewenangan intelektual bersifat tetap dan berkesinambungan, mengingat diregenerasi melalui pewarisan dan relasi sosial yang sudah terbentuk.¹¹

Dalam paradigma pendidikan Islam tradisional, pengakuan atas otoritas keilmuan pesantren tercermin jelas dalam metode pengajaran kitab kuning yang sangat bergantung pada sanad dan *talaqqi*. Sebagai ilustrasi, di berbagai pesantren salaf, termasuk Pesantren Lirboyo di Kediri atau Pesantren Sidogiri di Pasuruan, kredibilitas akademis seorang kiai tidak diukur melalui ijazah formal, melainkan melalui pengakuan bersama atas penguasaannya yang mendalam terhadap kitab, terjaminnya mata rantai periwayatan keilmuan, serta konsistensinya dalam mengaplikasikan ilmu. Seorang santri tidak diakui memiliki kapabilitas untuk mengajarkan kitab tertentu sebelum menerima otorisasi (ijazah atau *taqirri*) dari kiainya. Metode ini menegaskan bahwa otoritas keilmuan yang

⁹ Samsul, "The Urgency of Digitalizing Islamic Religious Learning in Pesantren," 1–12.

¹⁰ Mas'ud, *Paradigma Pendidikan Islam Humanis*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 112-115.

¹¹ Susanti, "Innovative Digital Media in Islamic Religious Education Learning," (2024), 250-253.

dipegang pesantren memiliki karakteristik hierarkis, bersifat individual, dan berakar pada hubungan etis antara pendidik dan peserta didik.

Transformasi dan Rekonfigurasi Otoritas Keilmuan Pesantren di Era Digital

Digitalisasi dalam konteks pesantren tidak dapat dipahami semata-mata sebagai adopsi teknologi informasi untuk kepentingan pembelajaran atau dakwah. Lebih dari itu, Transformasi digital mewakili pergeseran fundamental yang menciptakan arena sosiologis baru untuk penciptaan, penyebaran, dan validasi pengetahuan Islam. Sifat arena digital yang terbuka, dinamis, dan melintasi batas geografis memfasilitasi sirkulasi pengetahuan keagamaan di luar kerangka regulasi tradisional yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pesantren.¹²

Dalam periode belakangan ini, pesantren telah menunjukkan partisipasi yang semakin intensif dalam domain digital melalui penyelenggaraan pengajian secara daring, pemanfaatan berbagai saluran media sosial, serta adopsi platform edukasi berbasis teknologi. Keterlibatan ini mengindikasikan bahwa pesantren tidak sepenuhnya terisolasi dari fenomena digitalisasi, tetapi sedang berupaya menyesuaikan diri dengan tatanan baru yang mengharuskan modifikasi dalam cara berkomunikasi dengan santri dan masyarakat luas. Namun demikian, karakter keterbukaan yang melekat pada ranah digital juga menghadirkan tantangan serius terhadap mekanisme otoritas keilmuan pesantren yang selama ini bergantung pada relasi tatap muka, sanad, dan validasi internal.¹³

Transformasi digital telah menghasilkan implikasi mendalam terhadap tatanan otoritas keilmuan di lingkungan pesantren. Pada model tradisional, legitimasi keilmuan secara substantif berpusat pada sosok kiai sebagai otoritas tunggal. Namun, era digital telah memunculkan konfigurasi otoritas yang lebih terfragmentasi, mengakomodasi berbagai partisipan dalam produksi dan diseminasi diskursus keagamaan. Otoritas tidak lagi terbatas pada monopoli satu individu atau lembaga semata, melainkan terdistribusi dalam sebuah jejaring aktor keagamaan daring. Platform digital memungkinkan santri, mantan santri, maupun penceramah mandiri untuk mendistribusikan tafsir keagamaan mereka secara langsung kepada khalayak luas, melampaui jalur validasi konvensional pesantren. Konsekuensinya, hierarki otoritas yang sebelumnya bersifat vertikal mengalami pergeseran menuju tatanan yang lebih horizontal dan dinamis.

Fragmentasi otoritas ini tidak serta-merta menghapus posisi pesantren sebagai sumber legitimasi keilmuan, melainkan menciptakan kondisi di mana pesantren harus berbagi ruang legitimasi dengan aktor-aktor keagamaan digital.

¹² Campbell, *Digital Religion*, (London: Routledge, 2021), 22–25.

¹³ Woodhead, "The Individualisation of Religious Authority," *Religion* 51, no. 3 (2021): 393–98.

Otoritas pesantren tetap memiliki kekuatan simbolik dan historis, namun pengaruhnya kini beroperasi dalam medan kompetisi simbolik yang ditentukan oleh jangkauan media, frekuensi interaksi, dan daya tarik komunikasi. Dalam konteks ini, otoritas keilmuan tidak lagi semata-mata bersandar pada kedalaman penguasaan ilmu, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan performatif dalam menyampaikan pesan agama.

Selain fragmentasi, digitalisasi juga menandai pergeseran dari otoritas epistemik menuju otoritas performatif. Dalam tradisi pesantren, otoritas epistemik dibangun melalui penguasaan literatur klasik, metode keilmuan yang sah, dan kesinambungan rantai keilmuan. Sebaliknya, di ruang digital, otoritas keagamaan kerap dibentuk melalui performa komunikasi yang efektif, emosional, dan mudah diakses. Kemampuan menyederhanakan pesan agama, membangun kedekatan dengan audiens, serta menyesuaikan diri dengan logika algoritma media sosial menjadi faktor penting dalam pembentukan pengaruh keagamaan. Akibatnya, pengetahuan ilmiah tidak selalu menjadi sumber utama legitimasi, melainkan bersanding dengan dimensi popularitas dan penerimaan publik.¹⁴

Digitalisasi juga memfasilitasi individualisasi otoritas keagamaan. Individu kini memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mencari, menyeleksi, dan mengintegrasikan beragam sumber ajaran agama sesuai dengan preferensi pribadi. Dalam skenario ini, keterikatan intelektual santri terhadap seorang kiai tunggal atau institusi pesantren tertentu mengalami pergeseran. Santri tetap dapat menunjukkan penghormatan terhadap otoritas pesantren, namun secara simultan mengadopsi perspektif keagamaan dari sumber-sumber digital lain yang dianggap relevan. Otoritas yang sebelumnya bersifat kolektif dan mengikat berevolusi menjadi lebih fleksibel dan kontekstual.¹⁵

Menghadapi kondisi tersebut, pesantren tidak bersikap pasif, melainkan secara aktif terlibat dalam proses negosiasi dan rekonfigurasi otoritas keilmuan.¹⁶ Pada tataran epistemik, pesantren tetap mempertahankan tradisi literatur keagamaan klasik (*turats*), silsilah keilmuan (*sanad*), dan metodologi mazhab sebagai basis legitimasi primer, sembari menyesuaikan cara representasinya agar kompatibel dengan paradigma digital. Penataan ulang ini tidak mengindikasikan

¹⁴ Roy, *Holy Ignorance: When Religion and Culture Part Ways*, (Oxford: Oxford University Press, 2020), 94–99.

¹⁵ Possamai, “Religion and the Media in the Digital Age,” *Social Compass* 68, no. 4 (2021): 517–520.

¹⁶ Salvatore, “The Sociology of Islamic Authority in the Digital Age,” *Sociology of Religion* 82, no. 3 (2021): 257–260.

pergeseran paradigma fundamental, melainkan formulasi ulang mekanisme kerja otoritas keilmuan dalam wadah yang lebih kontemporer.¹⁷

Pada tataran kelembagaan, pesantren mengembangkan eksistensi institusional di ranah digital melalui pengelolaan media sosial, pengajian daring, dan unit dakwah digital yang terstruktur. Strategi ini berfungsi untuk mengalihkan logika otoritas digital dari ranah personal menuju otoritas kolektif berbasis institusi, sekaligus sebagai mekanisme kontrol epistemik terhadap pengetahuan keagamaan yang disebarluaskan.¹⁸ Pada tataran kultural, hubungan antara kiai, santri, dan masyarakat juga mengalami penyesuaian, di mana mandat keilmuan kiai direpresentasikan melalui kedekatan simbolik di ruang digital tanpa sepenuhnya tunduk pada logika popularitas.

Proses negosiasi ini melahirkan model otoritas hibrida, yaitu sintesis antara mandat keilmuan konvensional dan mandat digital. Dalam kerangka ini, pesantren tidak menutup akses santri terhadap sumber keagamaan digital, tetapi membekali mereka dengan literasi keilmuan dan literasi digital agar mampu melakukan penilaian kritis terhadap keabsahan pengetahuan Islam¹⁹. Dengan demikian, otoritas keilmuan pesantren tidak mengalami kemunduran, melainkan bertransformasi menjadi bentuk yang lebih reflektif dan adaptif, sembari tetap mempertahankan landasan tradisi keilmuan Islam sebagai inti identitasnya.²⁰

Oleh karena itu, negosiasi dan penataan ulang otoritas keilmuan di lingkungan pesantren pada era digital tidak dapat sekadar dilihat sebagai respons defensif. Transformasi ini justru mencerminkan kapabilitas adaptif pesantren sebagai sebuah institusi keilmuan yang piawai dalam menginterpretasikan perubahan sosial dan meresponsnya secara strategis. Otoritas keilmuan pesantren kini bertransformasi dari sifat absolut dan eksklusifnya, namun tetap mempertahankan landasan legitimasi fundamentalnya. Pergeseran ini mengarah pada bentuk otoritas yang lebih reflektif, kondusif untuk dialog, dan relevan secara kontekstual, tanpa mengabaikan akar tradisi keilmuannya. Paradigma perubahan ini yang memungkinkan pesantren mempertahankan relevansinya sebagai penghasil pengetahuan keislaman di tengah kompleksitas lanskap keagamaan digital yang beragam dan penuh persaingan.²¹

¹⁷ Oktaria, "Peran Pesantren Dalam Era Digital," *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, (2024): 230-235.

¹⁸ Ibid, 247-250.

¹⁹ Shobri, M., Pd, M., Tabroni, I., Nurdiana, D. D., Hamzah, H., Rambe, P., ... & Rosita, T., "Manajemen Pondok Pesantren" (2023): 102-107

²⁰ Cheong, "Institutional Religious Authority and Digital Media," *Journal of Religion, Media and Digital Culture* 10, no. 2 (2021): 145-148.

²¹ Sumbulah, "Media Sosial Dan Otoritas Keagamaan Di Indonesia." *Al-Ulum* 21, no. 2 (2021): 291-308.

Perundingan dan penataan ulang kekuasaan akademis di pesantren dapat diamati pada usaha beberapa pesantren terkemuka yang secara sengaja membentuk eksistensi institusional di ranah digital. Sebagai ilustrasi, sebagian pesantren meluncurkan saluran YouTube resmi yang menyiarkan kajian kitab kuning secara daring, disertai dengan penjabaran metodologis dan penunjukan pada literatur warisan. Melalui praktik ini, pesantren tidak mengabaikan digitalisasi, melainkan memanfaatkannya sebagai medium untuk memperluas cakupan keilmuan. Para kiai tetap memegang posisi sentral dalam pemberian legitimasi, namun kekuasaan mereka direfleksikan dalam bentuk digital yang lebih luwes. Inisiatif ini menandai perwujudan otoritas hibrida, di mana warisan keilmuan tradisional dipertahankan seraya direinterpretasi agar tetap relevan dalam konstelasi keagamaan digital saat ini.

KESIMPULAN

Otoritas keilmuan pesantren dalam tradisi pendidikan Islam klasik dibangun melalui sanad keilmuan, penguasaan turats, dan relasi hierarkis kiai–santri yang menempatkan pesantren sebagai pusat legitimasi pengetahuan keislaman. Digitalisasi telah mengubah struktur otoritas tersebut dengan memunculkan fragmentasi, individualisasi, serta pergeseran menuju otoritas yang lebih performatif. Meskipun demikian, pesantren tidak kehilangan perannya, melainkan melakukan negosiasi dan rekonfigurasi otoritas melalui adaptasi epistemik dan kelembagaan. Dengan membentuk model otoritas hibrida, pesantren mampu mempertahankan identitas keilmuannya sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika lanskap keagamaan digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan semata-mata ancaman bagi otoritas keilmuan pesantren, melainkan juga peluang strategis untuk mereaktualisasikan peran pesantren sebagai institusi keilmuan Islam yang relevan dengan konteks zaman. Pesantren tetap memiliki potensi besar untuk berperan sebagai rujukan normatif dan kurator pengetahuan keislaman di tengah kompleksitas dan pluralitas lanskap keagamaan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraar, Muhammad. “Digitalisasi Kitab Kuning: Analisis Dampak Aplikasi Fikih Digital Terhadap Otoritas Keilmuan Pesantren.” *An-Nur: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 2 (2024).
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global Dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2020.

- Baidowi, Ahmad. "Kiai, Media Digital, Dan Rekonstruksi Otoritas Keagamaan." *Jurnal Komunikasi Islam* 11, no. 2 (2021).
- Campbell, Heidi A. *Digital Religion*. London: Routledge, 2021.
- Cheong, Pauline Hope. "Institutional Religious Authority and Digital Media." *Journal of Religion, Media and Digital Culture* 10, no. 2 (2021).
- Faozan, Ahmad. "Sanad Keilmuan Pesantren Di Tengah Transformasi Digital." *Jurnal At-Tabrir* 22, no. 2 (2022).
- Jamil, Zawaqi Afdal. "Program Evaluation Study on Islamic Religious Education in Pesantren: Addressing Educational Degradation in the Digital Era." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 22, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.14421/jpai.2025.221-12>.
- Kuswana, Dadang, and Muhamad Hilmi Puzian. "Religious Authority in the New Media Era: Da'wah of Islamic Boarding School on Social Media." *Jurnal Ilmu Dakwah* 44, no. 2 (2024).
- Mandaville, Peter. "Authority and Authenticity in Islamic Thought." *The Muslim World* 111, no. 3 (2021).
- Mas'ud, Abdurrahman. *Paradigma Pendidikan Islam Humanis*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mustofa, Mahmud Yunus, Abdurrahman Mas'ud, and Misbah Zulfa. "Hybrid Pesantren in Indonesia: Analyzing the Transformation of Islamic Religious Education in the Digital Age." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2024).
- Muzayana. "TikTok, Digital Da'wa, and Religious Authorities in Contemporary Islam." *Journal of Islamic Communication and Culture* 2, no. 1 (2023).
- Oktaria, Auline. "Peran Pesantren Dalam Era Digital." *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 2024.
- Possamai, Adam. "Religion and the Media in the Digital Age." *Social Compass* 68, no. 4 (2021).
- Pratama, Arizqi Ihsan. "Literasi Digital Santri Sebagai Strategi Penguatan Pesantren," n.d.
- Rachman, Saumantri, and Hidayatulloh. "Transformation of Religious Authority in the Digital Era: A Post-Normal Times Analysis." *Jurnal Dakwah*, 2025.
- Roy, Olivier. *Holy Ignorance: When Religion and Culture Part Ways*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Saat, Norshahril. "Religious Authority in Southeast Asia's Digital Public Sphere." *Contemporary Southeast Asia* 43, no. 2 (2021).
- Salvatore, Armando. "The Sociology of Islamic Authority in the Digital Age." *Sociology of Religion* 82, no. 3 (2021).
- Samsul, A R. "The Urgency of Digitalizing Islamic Religious Learning in Pesantren." *Al-Irfan: Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2024).
- Shobri, M., Pd, M., Tabroni, I., Nurdiana, D. D., Hamzah, H., Rambe, P., ... & Rosita, T. "Manajemen Pondok Pesantren." Zahir Publishing (2023).

- Sumbulah, Umi. "Media Sosial Dan Otoritas Keagamaan Di Indonesia." *Al-Ulum* 21, no. 2 (2021).
- Susanti, Septiani S. "Innovative Digital Media in Islamic Religious Education Learning," 2024.
- Widodo, Ari Abdi, and Muhammad Husni. "Strategi Digitalisasi Pendidikan Pesantren." *IHSAN*, 2025.
- Woodhead, Linda. "The Individualisation of Religious Authority." *Religion* 51, no. 3 (2021).